

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA JAMBI

Muhammad Sabyan¹, Rina Widyanti²

¹ Universitas Muhammadiyah Jambi

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: sabyanaab@gmail.com, rinawidyanti99@yahoo.com

Abstract

Abstract : This study wants to see how economic growth and the regional minimum wage on poverty in the city of Jambi, after conducting research that economic growth has a negative effect on poverty levels with a regression coefficient value of -0.511 this indicates that if there is an increase in economic growth of 1 percent, then can reduce poverty by 0.511 percent, while the regional minimum wage has a negative effect with a regression coefficient value of -0.001, this shows that when the minimum wage increases by 1 rupiah, it can reduce the poverty rate by 0.001 percent

Keywords: Economic Growth, Minimum Wage

Abstrak : Penelitian ini ingin melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional terhadap kemiskinan di kota Jambi, setelah melakukan penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,511 hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi 1 persen, maka dapat mengurangi kemiskinan sebesar 0,511 persen, sedangkan upah minimum regional berpengaruh negatif dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,001, hal ini menunjukkan bahwa ketika upah minimum naik sebesar 1 rupiah maka dapat mengurangi kemiskinan tarif sebesar 0,001 persen

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam pembangunan dengan masalah pengangguran dan kesenjangan yang ketiganya saling kait mengkait. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, masalah kemiskinan semakin menjadi primadona sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 lalu. Kemiskinan menjadi semakin sering dibicarakan karena adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup tajam yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tersebut. Kemiskinan di Indonesia sekarang ini telah menjadi suatu masalah nasional yang bahkan pemerintah pun tengah mengupayakan usaha pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan.

Kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan melalui UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 dan disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar kepada semua bidang pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan tujuan agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pada pembangunan ekonomi di daerah, tujuan pembangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, proses pembangunan di daerah jauh lebih spesifik (Tambunan,2011).

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah:

1. Menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu.
2. Meningkatkan produktivitas pekerja.
3. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2013)

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang akan diolah dan dianalisis untuk kepentingan penelitian adalah data adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang berkala yang di kumpulkan untuk menggambarkan tentang perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu (*time series*) periode penelitian 2011-2021

Analisis Data

1. Model analisis untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum regional terhadap kemiskinan di Kota Jambi maka digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan alat analisis sebagai berikut :

$$y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

y = Kemiskinan

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Upah Minimum Regional

α, β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan pengujian model kuantitatif menggunakan Metode Linier Berganda, melalui program SPSS, dimana hasil Hipotesis pengujian model Regresi Linier Berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.921	2.632		6.157	.000
	pertumbuhan ekonomi	-.511	.451	-.231	-2.276	.018
	upah minimum regional	-.001	.002	-.537	-2.281	.029

a. Dependent Variable: kemiskinan

$$Y = 4.921 - 0.511X_1 - 0.001X_2 + e$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

Model Persamaan regresi berganda tersebut bermakna :

- Besarnya nilai koefisien kemiskinan (Dependen variabel) mempunyai regresi dengan arah positif menyatakan bahwa bila tidak ada pergerakan dari pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional atau variabel independent berlaku konstan maka kemiskinan mempunyai pergerakan angka sebesar 4,921.
- Besarnya nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi mempunyai regresi dengan arah negatif artinya jika ada kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.511 persen
- Besarnya nilai koefisien upah minimum regional mempunyai regresi dengan arah negatif menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan upah minimum sebesar 1 rupiah, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.001 persen.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.576 ^a	.332	.308	.17490

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional

Berdasarkan hasil pada tabel diatas didapatkan nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,332. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional dalam menjelaskan kemiskinan sebesar 33,2% sedangkan 66,8% dijelaskan oleh faktor lain yang berada diluar model dan tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Karena kemajuan suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Apabila suatu daerah atau wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan adanya standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja/karyawan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja dapat meningkat. Hal tersebut juga merupakan perlindungan bagi para pekerja agar tidak terjerat dalam kemiskinan

Saran

1. Dari hasil penelitian, di dapat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga ke depannya dapat dilaksanakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dilaksanakan pemerataan pembangunan yang berorientasi keseluruhan golongan masyarakat termasuk masyarakat miskin, serta dilakukan adanya upaya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah/wilayah dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki di suatu daerah/wilayah tersebut.
2. Penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan dan tingkat upah paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM) atau kebutuhan hidup layak (KHL) untuk melindungi para pekerja, Diharapkan dengan adanya upah minimum, seorang pekerja menerima upah sesuai standar kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan hidup layak serta dapat terhindar dari garis kemiskinan

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abhijit Banerjee, 2012, *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. New York:
- Abdul Khakim, 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi,. CitraAditya Bakti, Bandung,
- Ace, Partadiredja, 2014, *Ekonomika*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Arief, 2012. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan*. Tangerang. Ciputat Press
- Arsyad, Lincolin, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, UPP YKPN, Yogyakarta
- Bappenas, 2015, *Program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah*.
- Blakely, 2012, *Planning local economic development: Theory and practice Sage Publications*.
- Boediono, 2012, *Ekonomi Makro*, Seri Sinopsis, LP FE-UGM, Yogyakarta

- BPS, 2019, *Data Dan Informasi Kemiskinan.*, Jakarta
- Jhingan, ML, 2014, *Ekonomi Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2014, *Ekonomi Pembangunan*, UPP YKPN, Yogyakarta
- Mangkusoebroto, Guritno, 2012, *Ekonomi Publik*, BP FE-UGM, Yogyakarta
- Richardson, HW, 2011, *Regional Economics*, New York Prareger Publihers
- Sjafrizal, 2018. *Pola Kebijakan Pembangunan Wilayah di Indonesia : Suatu Gagasan*” EKI, Vol.XII.
- Soekartawi, 2002, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Penerbit Obor, Bandung
- Sumarsono, 2013, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta
- Suparmoko, 2012, *Ekonomi Pembangunan*, BP FE-UGM, Yogyakarta
- Sukirno, Sadono, 2011, *Teori Ekonomi Makro*, LPFE-UI, Jakarta
- _____, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, LPFE-UI, Jakarta
- Susanti, Hera, dkk, *Indikator Ekonomi Makro*, Penerbit Lp FE-UI, Jakarta
- Tambunan, TH, Tulus, 2011 *Perekonomian Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 2006, *Transformasi Ekonomi Di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Todaro, MP, 2011, *Ekonomi Pembangunan Di negara Dunia Ke tiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Yuwono, 2014, *Perencanaan Pembangunan*, Penerbit Obor, Bandung
- Wijaya, Faried, 2001, *Ekonomi Makro*, LP FE-UI, Jakarta